**PENGARUH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
(SILPA), PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
TERHADAP BELANJA DAERAH:
DALAM PRESFEKTIF TEORITIS**

SIHAR SIMAMORA
Dosen Politeknik Negeri Medan
Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah dalam presfektif teoritis sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), penerimaan dan pengeluaran pembiayaan memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Kajian ini dianalisis dengan menggunakan hasil telaah literatur dan hasil penelitian-hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan konsep tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara teoritis sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), penerimaan dan pengeluaran pembiayaan berpengaruh terhadap total belanja daerah dimasa yang akan datang.

Keywords: Belanja daerah, SILPA, penerimaan, pengeluaran pembiayaan

PENDAHULUAN

Berlakunya paket undang-undang di bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah mengubah secara drastis sistem penganggaran di Indonesia. Paket undang-undang tersebut merupakan fondasi bagi pelaksanaan reformasi di bidang keuangan. Reformasi terkait dengan berlakunya paket undang-undang di bidang keuangan negara tersebut adalah:

- 1) Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*),
- 2) Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework/ MTEF*),
- 3) Penerapan Anggaran terpadu (*Unified Budget*).

Pada prinsipnya ketiga hal tersebut adalah jawaban atas semakin meningkatnya tuntutan untuk terciptanya transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengelolaan APBN. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan prinsip yang harus dapat diterapkan dengan baik untuk menjawab harapan publik terhadap anggaran pemerintah.

Dalam pelaksanaan sistem penganggaran di Indonesia dinyatakan ketiga pendekatan tersebut telah diadopsi dan telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya ditemui berbagai macam kendala yang masih sangat sulit untuk dipecahkan. Penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah telah diadopsi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga meskipun masih belum sempurna begitu juga penerapan unified budget (penyatuan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan) juga telah diterapkan dan senantiasa terus dipertegas dan dipertajam. Penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja merupakan hal yang paling sulit untuk diimplementasikan meskipun secara formal telah

dinyatakan berlaku namun semua pihak masih mengakui bahwa penerapan prinsip tersebut masih jauh dari yang diharapkan.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Walau demikian, gambaran sementara penyerapan anggaran berdasarkan laporan SKPD, hanya mencapai sekitar 60%-75%. Penyerapan anggaran itu meliputi belanja

pegawai atau pengeluaran rutin dan belanja non-pegawai atau kegiatan pembangunan. Penyebab rendahnya penyerapan anggaran diindikasikan karena sebagian besar kegiatan pembangunan, baik pengadaan barang dan jasa (konstruksi), masih dalam proses perampungan. Secara administrasi, kegiatan itu sudah menyerap anggaran.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan belanja adalah terlaksananya program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari/ pencairan dana cadangan serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari: penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman, transfer ke/ pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada rekening kas umum daerah. Transaksi pengeluaran pembiayaan berasal dari: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman (utang) dan pemberian pinjaman daerah.

Semakin besar jumlah SILPA pada tahun anggaran akan berdampak terhadap pemenuhan komposisi jumlah belanja daerah pada periode berikutnya. Selain itu pemenuhan cukup tidaknya jumlah belanja daerah pada periode berikutnya

ditentukan oleh besarnya pembiayaan yang dilakukan. Apabila terjadi defisit APBD maka pemerintah daerah yang bersangkutan akan melakukan pinjaman daerah untuk menutupi kebutuhan belanja daerah yang dilakukan pada P-APBD kabupaten kota yang bersangkutan.

Syukriy Abdullah dan Abdul Halim (2006) melakukan penelitian dengan topik studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan. Penelitian ini menganalisis keterkaitan belanja modal dengan belanja pemeliharaan dalam anggaran pemerintah daerah dengan menggunakan data realisasi anggaran setelah otonomi daerah dengan tujuan memberikan bukti empiris tentang asosiasi alokasi belanja modal terhadap belanja pemeliharaan dan asosiasi sumber pendapatan dengan belanja modal. Dalam penelitian tersebut diambil sampel kabupaten/kota di beberapa provinsi di Sumatera. Jumlah kota yang menjadi sampel yaitu 20 kabupaten dan 12 kota. Hasil dari penelitian itu menyimpulkan bahwa belanja modal berasosiasi positif terhadap belanja pemeliharaan. Sumber pendapatan daerah berupa dana perimbangan berasosiasi positif terhadap belanja modal.

Selain itu Riset yang dilakukan oleh Sumini dan Nur Cholis Madjid (2009) bahwa ketidakjelasan implementasi visi dan misi merupakan penyebab terjadinya ketidakjelasan output dan outcome dalam penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengkaji secara teoritis Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan berpengaruh Terhadap Total Belanja Daerah Dimasa yang akan

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Setelah

ditetapkan menjadi peraturan daerah, APBD tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lalu pada akhir tahun pemerintah daerah membuat laporan keuangan yang salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban (1) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (3) mengembangkan kehidupan demokrasi (4) mewujudkan keadilan dan pemerataan (5) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan (6) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan (7) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak (8) mengembangkan sistem jaminan sosial (9) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah (10) mengembangkan sumber daya produktif di daerah (11) melestarikan lingkungan hidup (12) mengelola administrasi kependudukan (13) melestarikan nilai sosial budaya (14) membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya dan (15) kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan daerah mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerah sendiri. Kondisi ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal dimana suatu daerah harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tercermin dalam pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan, seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dengan demikian prinsip yang digunakan adalah *money follows functions*, artinya bahwa besarnya distribusi keuangan didasarkan oleh distribusi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang telah ditentukan terlebih dahulu. Sehingga secara umum, hubungan

antara pusat dan daerah tercermin dalam aspek perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*) untuk semua aktivitas disetiap level pemerintahan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Desentralisasi selain mengandung banyak manfaat ternyata juga menyimpan banyak permasalahan terutama yang terkait dengan pemisahan suatu daerah untuk menjadi daerah baru sehingga dimensi spasial menjadi makin kecil. Karenanya desentralisasi juga dapat menghasilkan suatu dampak berupa eksternalitas yang makin besar sehingga berkesan penyediaan barang publik yang *under provided*.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara adil dan proporsional, demokratis dan transparan, dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa LRA yang disusun pemerintah daerah sekurang-kurangnya mencakup pos-pos pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan Silpa. Pendapatan pemerintah daerah dapat berupa Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah), pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, belanja daerah dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi dua kelompok yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung, dimana belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (misalnya belanja gaji pegawai negeri), Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya transfer merupakan

transfer pemerintah kepada pemerintah yang lebih rendah (pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/ kota). Selisih antara pendapatan disatu pihak dengan belanja dan transfer dilain pihak merupakan surplus atau defisit. Surplus terjadi apabila pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja dan transfer, sedangkan defisit terjadi apabila pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja dan transfer.

Dalam LRA juga terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, dan dari penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto. Selisih antara Surplus/defisit dengan pembiayaan neto inilah yang disebut sebagai SILPA.

Silpa ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Untuk dapat menjelaskan lebih lanjut Silpa ini datangnya darimana, maka diperlukan pengkajian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi overtarget dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Jika Silpa tersebut datangnya dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah, hal ini merupakan hal yang tidak mengembirakan.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal baik peralatan atau teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Barang/jasa tersebut dapat berupa perbaikan jalan umum yang rusak, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana lainnya yang dapat dinikmati masyarakat.

Belanja Daerah

Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah “semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.” Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Permendagri no 13 Tahun 2006). Menurut Halim dan Nasir (2006 : 44), belanja daerah adalah “semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”

1) Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 masih menggunakan istilah Belanja Aparatur. Sejak berlakunya Permendagri No.59 Tahun 2007 istilah Belanja Aparatur diganti dengan istilah Belanja Tidak Langsung. Mengingat data yang digunakan dalam periode tahun 2005 sampai dengan 2009 sehingga istilah tersebut tetap digunakan. Belanja aparatur/belanja tidak langsung dapat diuraikan meliputi : belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, belanja modal. Belanja administrasi umum terdiri dari : belanja pegawai/personalia (pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan, biaya perawatan dan pengobatan, pengembangan SDM), belanja barang dan jasa (pembayaran pokok hutang dan bunga/jasa bank, rekening listrik, air, telepon dan ongkos kantor lainnya), belanja perjalanan dinas (biaya dalam rangka melaksanakan tugas ke luar daerah), belanja pemeliharaan (membiayai pemeliharaan gedung dan kantor serta inventaris kantor). Pos-pos belanja operasi dan pemeliharaan sama dengan belanja administrasi umum, yaitu meliputi: belanja pegawai/personalia (pembayaran honorarium/upah, uang lembur dan insentif), belanja barang dan jasa(belanja bahan/material, biaya jasa pihak ke tiga, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa, biaya makan dan minum, dan biaya pakaian kerja), belanja perjalanan dinas (biaya perjalanan dalam rangka pelaksanaan program),

belanja pemeliharaan (membiayai peningkatan masa manfaat sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan kepada masyarakat).

2) Belanja Langsung

Belanja Pelayanan Publik/ Belanja Langsung sampai dengan tahun 2007 terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal. Belanja administrasi umum terdiri dari: belanja pegawai/ personalia (pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan, biaya perawatan dan pengobatan, pengembangan SDM), belanja barang dan jasa (pembayaran rekening listrik, air, telepon dan ongkos kantor lainnya), belanja perjalanan dinas (biaya dalam rangka melaksanakan tugas dalam daerah ke luar daerah), belanja pemeliharaan (membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor serta inventaris kantor).

Pos-pos belanja operasi dan pemeliharaan sama dengan belanja administrasi umum, yaitu meliputi: belanja pegawai/personalia (pembayaran honorarium/ upah, uang lembur dan insentif), belanja barang dan jasa (belanja bahan/ material, biaya jasa pihak III, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa, biaya makan dan minum, dan biaya pakaian kerja), belanja perjalanan dinas (biaya perjalanan dalam rangka pelaksanaan program), belanja pemeliharaan (membiayai peningkatan masa manfaat sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan kepada masyarakat). Belanja bagi hasil berupa bagi hasil retribusi kepada pemerintah desa. Sedangkan bantuan keuangan digunakan untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi. Belanja tidak tersangka digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, yaitu penyediaan sarana prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Sejak tahun 2007, pos belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

PEMBAHASAN

Riset yang dilakukan oleh Mutiara Maimunah (2006) dengan judul *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Variabel yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Hasil pengujian dari hipotesis alternatif pertama dan kedua adalah diterima, artinya besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif). Kedua, untuk mengetahui terjadi tidaknya *flypaper effect*, juga diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera. Ketiga, terdapat pengaruh *flypaper effect* dalam memprediksi Belanja Daerah periode ke depan, juga diterima. Keempat, hasil pengujian hipotesis alternatif keempat yang merupakan hipotesis uji beda adalah tidak dapat diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/ Kota pulau Sumatera. bidang Pendidikan. Selanjutnya telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah bidang Kesehatan. Hasil pengujian terakhir juga diterima, artinya Belanja Daerah bidang Pekerjaan Umum-pun terjadi *flypaper effect*.

Syukriy Abdullah dan Abdul Halim (2006) melakukan penelitian dengan topik studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan. Penelitian ini menganalisis keterkaitan belanja modal dengan belanja pemeliharaan dalam anggaran pemerintah daerah dengan menggunakan data realisasi anggaran setelah otonomi daerah dengan tujuan memberikan bukti empiris tentang asosiasi alokasi belanja modal terhadap belanja pemeliharaan dan asosiasi sumber pendapatan dengan belanja modal. Dalam penelitian tersebut diambil sampel kabupaten/kota di beberapa provinsi di Sumatera. Jumlah kota yang menjadi sampel yaitu 20 kabupaten dan 12 kota. Hasil dari penelitian itu menyimpulkan bahwa belanja modal berasosiasi positif terhadap belanja pemeliharaan. Sumber pendapatan daerah berupa dana perimbangan berasosiasi positif terhadap belanja modal.

Priyo Hari Adi (2006) melakukan penelitian dengan topik hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah. Penelitian ini meneliti dampak belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemandirian daerah dan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota se-Jawa Bali. Data yang akan digunakan dalam analisis ini adalah data APBD realisasi pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Bali tahun 1998–2003 Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pembangunan (belanja modal) memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD, serta pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD.

Dapat diketahui bahwa unsur utama perhitungan anggaran daerah (APBD) adalah penetapan sisa perhitungan tersebut merupakan penghubung antara APBD tahun anggaran yang lalu dengan APBD tahun anggaran berikutnya. Hal ini akan terlihat pada saat berakhirnya tahun anggaran (31 Desember) dan pada saat dimulainya APBD tahun anggaran yang baru (1 Januari), dimana sebelum terjadi aktivitas pendapatan daerah, di dalam kas daerah telah tersedia uang kas yang secara langsung merupakan bagian dari sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu. Sisa perhitungan anggaran tersebut dimasukkan dalam APBD serta perhitungan APBD sebagai sumber penerimaan pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan penjelasan di atas maka penghitungan APBD bukan hanya merupakan suatu perhitungan atas anggaran dan realisasi APBD, tetapi juga dapat dikatakan suatu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut meliputi pertanggungjawaban penerimaan maupun belanja, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Dari perhitungan anggaran dan realisasi pada sisi penerimaan akan terlihat selisih antara anggaran dengan realisasi penerimaan. Pada sisi belanja dengan melakukan perhitungan antara anggaran dan realisasi belanja. Dengan perhitungan belanja tersebut baik pada bagian penerimaan maupun pada bagian belanja akan terlihat sisa perhitungan anggaran.

SIMPULAN

Dari gambaran ringkas diatas menunjukkan alur bahwa SILPA yang ada pada periode tertentu di suatu daerah merupakan sisa lebih atas penggunaan anggaran pada periode sebelumnya dan akan digunakan untuk menutupi belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung dimasa yang akan datang sehingga peranan SILPA berpengaruh besar pada komposisi belanja daerah dimasa yang akan datang.

Pos penerimaan pembiayaan pada yang ada dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, dan dari penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain. Apabila pos penerimaan pembiayaan meningkat, maka akan dapat menutupi defisit APBD yang ada. Sehingga defisit APBD apabila ditutupi oleh penerimaan pembiayaan maka akan kembali surplus.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2006. "Study atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan biaya pemeliharaan dan sumber pendapatan", *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol 2 no. 2*, November 2006, hal. 17-32.
- Allen, R. 1999 "New Public Management: Pitfalls for Centrals and Eastern Europe." *Public Management Forum* 1(4).
- Ghozali, Imam. 2005. *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS"*. Badan Universitas Diponegoro. Semarang.
- Maimunah, Mutiara. 2006. "Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada

- Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera”. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Rosdini, Dini, 2007. *Akuntansi Pembiayaan dan Transaksi Nonkas Bagi Pemerintah Daerah*. Makalah Ini Dipresentasikan di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta 8 Juli 2008.
- Sumini dan Nurcholish Madjid, 2009, Analisis dan Penetapan Indikator Kinerja dalam Rangka Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, *Jurnal Badan Pelatihan Keuangan Menteri Keuangan RI*. Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Santoso, Singgih. 2007. *Mahir Menggunakan SPSS*. Penerbit PT. Elex Media Computndo. Jakarta.
- Stine, William F. 1994. Is Local Government Revenue Response it Federal Aid Symetrical? Evidence From Pennsylvania Country Government in an era of Retrenchment. *National Tax Journal* 47.No. 4. Hal : 799-816.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. SILPA dan Hak Masyarakat. <http://www3.hafiz-konsultan.com>.
- Buku APBD Sumatera Utara Tahun 2005-2010.
- Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang *Pajak Daerah*.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.